Ely Hartati Rasyid Akan Terus Perjuangkan Hak-hak Nelayan

written by Admin | September 20, 2022

Samarinda, *biwara.co* – Perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid, terkait dengan permasalahan para nelayan yang selama ini banyak terdampak atas aktivitas Bongkar Muat di Muara Berau.

Terkait hal tersebut, Ely mengaku telah menghubungi pihak perusahaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB). Dirinya mengatakan bahwa saat ini PT PTB telah mengajukan izin bongkar muat di wilayah Muara Berau.

“Nantinya, ketika izin telah disetujui. Mereka akan berkontribusi untuk nelayan terdampak di sana,” ucapnya, pada Selasa (20/9/2022).

Dikatakan oleh Ely, untuk saat ini jumlah keseluruhan nelayan yang terdampak atas aktivitas bongkar muat di Muara Berau ada sekitar 229 orang.

“Oleh karenanya, kami benar-benar berharap agar PTB bisa berkontribusi terhadap nelayan,” ucapnya.

Keseriusan Politikus PDI Perjuangan Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) ini terhadap hak-hak para nelayan tidak main-main. Pasalnya, semua itu dibuktikan Ely dengan menghubungi pihak perusahaan setelah RDP di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim.

Secara langsung, Ely juga telah menanyakan formula khusus yang akan digunakan PT PTB terhadap kesejahteraan nelayan di Muara Berau.

“Saya tanya, apakah ada formula khusus untuk nelayan. Mereka menjawab ada. Tapi setelah izin bongkar muat selesai dan sudah beraktivitas. Nanti, kita harus rapat lagi dengan mereka untuk membicarakan ini lebih lanjut,” jelasnya.

Selain memperjuangkan hak-hak nelayan di wilayah Muara Berau, Ely juga mempertanyakan terkait keuangan daerah maupun retribusi ini, yang mana akan mendorong PT PTB untuk dapat menunaikan kewajibannya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim meningkat.

“Komisi II ini mengejar penghasilan, kalau PTB exciting kerjaan maka harus memberikan sebagian penghasilannya ke daerah. Nanti kita panggil lagi, karena kita harus tahu mereka investasinya berapa. Biasanya, kalau diatas Rp5 miliar itu wajib terdaftar di Kaltim, wajib diketahui Gubernur dan wajib pajak penghasilannya disetor biar PAD kita meningkat,” terangnya.

Bukan tanpa alasan, potensi dipaparkan Ely merujuk pada fakta lapangan, yang di mana wilayah Muara Berau diketahui merupakan terminal laut terbesar se-Asia Tenggara.

“Nah, harusnya berkontribusi langsung kepada Kaltim. Kita tidak boleh kehilangan momen untuk meningkatkan PAD,” tuturnya.

“Kita ini di Komisi II, jadi kita harus tahu siapa saja yang memberikan kontribusinya untuk daerah. Apalagi menurut Ketua DPRD Kaltim, wilayah Muara Berau itu floating terminal terbesar se-Asia Tenggara. Nah, harusnya berkontribusi langsung kepada Kaltim. Kita tidak boleh kehilangan momen untuk meningkatkan PAD,” pungkas Ely.(*)

Penulis : Cyn